

**THE EFFECT OF FINANCIAL TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY ON
BUMDes FINANCIAL MANAGEMENT IN PACET DISTRICT**

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDes DI KECAMATAN
PACET**

Salsabilla Ayu Wishmilia¹, Fajar Syaiful Akbar²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur^{1,2}

salsabillayuw99@gmail.com¹, fajarsa.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of transparency and financial accountability on the financial management of BUMDes in Pacet District using quantitative research methods. The sampling technique used a Likert scale to determine measurements and purposive sampling for sampling with a total of 3 respondents in 16 BUMDes, so that a total of 48 respondents. The analysis technique used in this study is the PLS-SEM analysis technique to test the validity and reliability (outer model test) and to test the coefficient of determination (inner model test). Based on the results of the research conducted, it shows that transparency has no significant effect on BUMDes financial management. Financial accountability has a significant effect on BUMDes financial management.

Keywords: *Transparency, Financial Accountability, Financial Management, BUMDes*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan, terhadap pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Pacet dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan skala likert untuk menentukan pengukuran dan purposive sampling untuk pengambilan sampel dengan jumlah responden sebanyak 3 orang pada 16 BUMDes, sehingga total responden sebanyak 48 orang. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik analisis PLS-SEM untuk menguji validitas dan reliabilitas (uji outer model) serta untuk menguji koefisien determinasi (uji inner model). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan pada pengelolaan keuangan BUMDes. Akuntabilitas keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan BUMDes.

Kata Kunci: *Transparansi, Akuntabilitas Keuangan, Pengelolaan Keuangan, BUMDes*

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yaitu Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa mengelola anggaran tambahan sebagai dana desa, yang secara bertahap tersedia. Dana desa tidak hanya fokus pada program keuangan tetapi juga pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas

pelayanan publik. Program dana desa memiliki beberapa bidang prioritas yang harus dilaksanakan oleh desa (Angelina & Linda, 2021).

Salah satunya yaitu, desa harus menemukan produk unggulan wilayah yang ada pada desa tersebut. Salah satu upaya pemerintah dalam mendorong ekonomi desa adalah program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDPT) Nomor 7 tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa menjelaskan bahwa dana desa pada tahun 2021-2022 diprioritaskan pada tiga hal yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi serta penanganan bencana dan non alam sesuai kewenangan desa. Dalam hal ini, penggunaan dana desa untuk BUMDes termasuk dalam kategori sebagai langkah pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa (Kementrian desa, 2021).

Dalam hal tersebut BUMDes juga membutuhkan laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang dipercaya kepadanya (Widodo & Suharyono, 2021). Laporan keuangan sangat berperan penting untuk mengetahui apakah suatu usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan potensi desa yang ada atau belum. Oleh karena itu, Akuntabilitas dan Transparansi perlu ditekankan dalam pelaporan keuangan sehingga dapat mencapai tujuan dari pembentukan BUMDes.

Transparansi sangat dibutuhkan dalam mengembangkan *good governance*, transparansi digunakan sebagai alat ukur dalam *good governance*, jadi baik atau buruknya *governance* ditentukan oleh tingkat transparansi organisasi atau pemerintahan (Gayatri et al., 2017).

Transparansi dapat memberikan efek yang baik bagi organisasi untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam organisasi pemerintahan. Pernyataan ini mengharuskan suatu organisasi transparan dalam pengelolaan laporan keuangannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Transparansi adalah faktor lain yang dapat memengaruhi pengelolaan uang. Baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pengungkapan materi dan informasi penting tentang perusahaan, transparansi dapat dipahami sebagai keterbukaan informasi. (Purwanti & Yuliati, 2022).

Selanjutnya akuntabilitas merupakan hal yang diinginkan oleh setiap entitas akuntansi baik organisasi profit atau nonprofit (Bergner et al., 2016). Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai aksi dari seseorang sebagai agen pemegang tanggung jawab kepada masyarakat (Williams, 2019). Akuntabilitas merupakan wujud dari tata kelola yang baik (*good governance*) dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat.

Bentuk pertanggungjawaban direalisasikan dalam bentuk laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi badan usaha sehingga diukur sejauh mana keberhasilan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat.

Oleh sebab itu, penggunaan dana untuk BUMDes ini perlu dilakukan pengawasan bagaimana penggunaannya dengan menekankan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi karena akuntabilitas dan transparansi merupakan gerbang utama dalam pengelolaan usaha guna menghindari adanya penyimpangan penggunaan dana yang dapat berdampak pada hukum dan berimbas pada macetnya usaha BUMDes yang mengakibatkan tujuan

dari pembentukan BUMDes menjadi tidak terlaksana (Angelina & Linda, 2021).

Kecamatan Pacet sendiri merupakan salah satu Kawasan wisata yang cukup terkenal di Jawa Timur, beberapa desa memiliki BUMDes untuk mengoptimalkan aset desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa, di Kecamatan Pacet memiliki 20 BUMDes pada setiap desa dan bergerak pada unit usaha berbeda-beda yang dikembangkan oleh setiap desa tersebut. Tetapi diantara 20 BUMDes terdapat 4 BUMDes yang tidak aktif berjalan selama periode 2022. penyebab dari salah satu tidak aktifnya BUMDes karena pengelolaan keuangan yang bermasalah. Dalam laporan keuangan BUMDes tersebut yang di serahkan ke desa tertulis adanya laba yang diperoleh BUMDes, sementara itu dari penjelasan yang diperoleh dari Kepala Desa, BUMDes tersebut tidak mendapatkan laba dalam satu periode seperti yang tertulis dalam laporan keuangan BUMDes. Sehingga BUMDes di non aktifkan untuk sementara yang mengakibatkan BUMDes tidak memberikan kontribusinya ke pendapatan asli desa (PADes).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Yurie et al (2021) dan Fadil et al (2022) menyatakan bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan BUMDes, Implementasi good corporate governance mempunyai arti penting dan nilai yang digunakan dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Maryono (2022) variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan, untuk variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelola keuangan.

Berdasarkan uraian masalah yang ada serta fenomena yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes di Kecamatan Pacet.

Agency Theory (Teori Keagenan)

Teori keagenan ini muncul ketika ada hubungan kerja antara satu orang atau lebih, prinsipal memberi wewenang dan bekerja sama dengan orang lain (agen) untuk mendapatkan otoritas dalam menjalankan perusahaan. Agen wajib melaporkan dan memberSikan informasi kepada prinsipal karena agen lebih mengetahui keadaan perusahaan daripada prinsipal (Zoebar & Miftah, 2020). Implikasi teori ini bahwa pengelola BUMDes (agen) yang telah diberikan amanah dan wewenang harus melaporkan pengelolaan BUMDes secara akuntabel dan transparan kepada pemerintah desa (prinsipal). Selain itu, pemangku kepentingan selaku pengguna informasi harus diberikan informasi yang dibutuhkan secara menyeluruh untuk meminimalisir timbulnya konflik dan asimetri informasi antara pihak prinsipal dan agen. Terkait kinerja pada pengelolaan BUMDes akan terus dievaluasi oleh pemerintah desa (prinsipal) sehingga BUMDes mampu lebih berkembang dan maju dengan pengelolaan yang baik dan benar.

Transparansi

Menurut Mardiasmo (2018) transparansi merupakan keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan suatu informasi. Transparansi diperkuat dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 transparansi merupakan penyampaian informasi keuangan yang secara terbuka

dan jujur kepada masyarakat karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui seluruh pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas Keuangan

Dalam Mardiasmo (2018) memberikan pengertian terhadap akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah yang digunakan sebagai tanggung jawab dalam menyediakan, melaporkan, dan pengungkapan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dari pihak pemberi Amanah yang berwenang sebagai wujud permintaan pertanggungjawaban tersebut. Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kegiatan dan tindakan pengurus suatu unit organisasi kepada pihak-pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Pengelolaan Keuangan

Nurliani et al., (2018) mendefinisikan pengelolaan adalah suatu proses dalam menyelesaikan hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian hal tersebut, terdapat tiga faktor yang mendasari antara lain: (1) adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia atau faktor-faktor produksi lainnya, (2) proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan, dan (3) adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan. Sedangkan Pengelolaan keuangan menurut Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan.

Rumusan Hipotesis

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik memperlihatkan transparansi yaitu terbukanya informasi laporan keuangan dan aktivitas yang dilakukan pemerintah melalui kebebasan masyarakat untuk mengaksesnya sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Peran dari masyarakat dibutuhkan agar kebijakan pemerintah dapat menghasilkan output yang optimal bagi masyarakat serta mencegah kecurangan. Tidak adanya transparansi dalam pengelolaan BUMDes dapat menyebabkan terjadinya tindak kecurangan serta hilangnya kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu transparansi dalam pengelolaan organisasi pemerintahan sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan masyarakat Sofyani et al., (2020).

Menurut Angelina dan Linda (2021) Sebagai lembaga ekonomi milik pemerintah BUMDes harus menerapkan prinsip transparan dalam sertiap pengelolaannya termasuk pelaporan keuangannya agar dapat dipercaya oleh masyarakat karena pengelolaan keuangan yang baik dan transparan dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Penjelasan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Apriliasari et al. (2019), Akbar et al. (2022), serta Yurie et al. (2021), yang menyatakan bahwa transparansi mempengaruhi pengelolaan keuangan BUMDes.

H1: Tingkat transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Pacet

Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes

Tingginya komitmen organisasi yang dimiliki pengelola Badan Usaha Milik Desa mampu mengurangi perilaku yang tidak etis dalam mengelola keuangan BUMDes serta kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes yang artinya semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin akuntabel pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa.

Bersumber dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar harus mempunyai beberapa aspek yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Menurut Angelina dan Linda (2021) penerapan akuntabilitas keuangan dalam BUMDes sangat diperlukan dalam pengelolaannya termasuk laporan keuangan, untuk itu laporan keuangan BUMDes haruslah sesuai dengan standar laporan keuangan yang dapat dipahami dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Rindi et al., (2019), Amerieska et al., (2021), serta Purba et al. (2021), yang menyatakan bahwa akuntabilitas mempengaruhi pengelolaan keuangan BUMDes.

H2: Tingkat akuntabilitas keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Pacet

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:23) penelitian kuantitatif merupakan sebuah penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik data yang digunakan dalam bentuk angka yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diharapkan jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini dapat menjelaskan hubungan yang sifatnya sebab-akibat, terkait dengan variabel transparansi, akuntabilitas keuangan, dan kompetensi sumber daya manusia (independen) yang mempengaruhi variabel pengelolaan keuangan BUMDes (dependen).

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yakni data primer. Sedangkan teknik yang digunakan yaitu survey dengan cara membagikan kuisioner sebagai instrumen pengambilan data. Populasi dari penelitian ini adalah 16 BUMDes yang aktif berjalan selama periode 2022 di Kecamatan Pacet. Penarikan sampel pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penggunaan metode ini dipilih karena akan mendapatkan hasil pilihan-pilihan tertentu dan akan diperoleh kriteria sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan teknik sampling yang telah dipilih, diambil sebagai sampel dengan jumlah 48 responden yang terdiri dari pelaksana operasional yaitu Ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes, dan Bendahara BUMDes dari di 16 BUMDes yang aktif di Kecamatan Pacet

Berdasarkan indikator variabel yang diukur dan dijadikan tolak ukur untuk dilakukannya penyusunan item-item instrument berupa pertanyaan. Skala yang digunakan dalam pengukuran penelitian ini menggunakan skala likert yang terdiri dari lima point, yaitu:

SS (Sangat Setuju)	= Poin 5
S (Setuju)	= Poin 4
N (Netral)	= Poin 3
TS (Tidak Setuju)	= Poin 2
STS (Sangat Tidak Setuju)	= Poin 1

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Transparansi (X1)

Transparansi yang dilakukan pemerintah akan mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Sehingga ada interaksi masyarakat dalam mengawasi serta menilai program-program pemerintah yang sudah atau belum terealisasi serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Bentuk transparansi yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan adalah:

- Terdapat laporan keuangan pemerintah daerah.
- Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.
- Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
- Terakomodasinya suara/usulan rakyat
- Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Akuntabilitas Keuangan (X2)

Akuntabilitas merupakan kewajiban pegawai untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumberdaya publik kepada pihak pemberi mandat. Indikator minimum akuntabilitas adalah:

- Kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan administratif dalam menjalankan tugas
- Adanya pertanggungjawaban atas proses dalam pelaksanaan kegiatan
- Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
- Kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
- Adanya output dan outcome yang terukur

Pengelolaan Keuangan (Y)

Pengelolaan keuangan adalah penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. dari sebuah yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Syahputra (2019) pengelolaan keuangan memiliki indikator sebagai berikut:

- Memiliki informasi yang relevan dan tepat waktu.
- Mampu melaksanakan pengelolaan keuangan secara ekonomi, efisien dan efektif, dan juga merata.
- Adanya keterbukaan (Transparansi) dalam pengelolaan keuangan.

Teknik Analisis Data

Dalam melakukan penelitian kuantitatif salah satunya adalah dengan menggunakan metode Partial Least Square (PLS). PLS adalah teknik statistika multivariat yang melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda dan variabel independen berganda. PLS adalah salah satu metoda statistik SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data, seperti ukuran sampel penelitian kecil, adanya data yang hilang dan multikolonieritas. SEM merupakan suatu metode statistic multivariat yang membantu peneliti untuk menguji teori dan riset empiris yang didukung oleh data (Ghozali, 2014).

Pengujian Hipotesis

Outer Model (*Measurement Model*)

Outer Model adalah bagian dari model SEM yang menilai validitas dan hubungan antar variabel beserta indikator-indikatornya dan juga reliabilitas variabel. Uji reliabilitas dipakai untuk menilai suatu konsep ataupun menguji tingkat konsistensi pada responden dalam menjawab setiap pertanyaan pada kuesioner (Abdillah & Hartono, 2015:).

Convergent Validity (Validitas Konvergen)

Menguji tingkat validitas ini berhubungan pada prinsip bahwa pengukur dari suatu variabel semestinya memiliki pengaruh korelasi yang tinggi. Dalam menguji valid dan tidaknya dalam PLS ini terlihat pada nilai loading factor untuk mengukur variabel tersebut. Rule of thumb harus memiliki outer loading $>0,7$ serta AVE (*Average Variance Extracted*) $>0,5$.

Discriminant Validity (Validitas Diskriminan)

Validitas diskriminan berhubungan pada prinsip dimana pengukur dari suatu variabel seharusnya tidak memiliki pengaruh korelasi yang tinggi. Pengukuran validitas diskriminan dilihat pada nilai cross loadingnya dengan nilai setiap variabel $>0,70$. Validitas diskriminan juga dapat diuji dengan membandingkan akar kuadrat AVE pada setiap variabel dengan korelasi antar variabelnya.

Composite Reliability

Pengujian reliability dalam dalam pengukuran variabel penelitian untuk menunjukkan tingkat akurasi, konsistensi, juga ketepatan. Pengujian menggunakan PLS dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan *composite reliability* dan cronbach alpha. Suatu

variabel dikatakan reliabel jika cronbach alpha memiliki reliabilitas diatas 0,6 ataupun *composite reliability*, konstruk memiliki reliabilitas diatas 0,7.

Inner Model (*Structural Model*)

Structural Model ialah pengukuran yang menggambarkan prediksi hubungan sebab akibat antar variabel yang diteliti. Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan R² untuk variabel dependen, dan nilai koefisien t-values pada tiap jalur untuk menguji hubungan positif atau negatif antar variabel. Nilai R² digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen pada variabel dependen. Model prediksi semakin baik jika nilai R² menunjukkan nilai yang semakin tinggi (Abdillah & Hartono, 2015).

Uji Hipotesis

Untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai probabilitas. Untuk nilai probabilitas, nilai p-value dengan alpha 5% adalah $<0,05$. Jika p-value $<0,05$ maka hipotesis diterima, apabila p-Value $>0,05$ maka hipotesis tidak diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Outer Model (Model Pengukuran)

Convergent Validity

Validitas convergent berhubungan dengan prinsip bahwa indikator-indikator dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Validitas convergent dinilai berdasarkan nilai loading faktor dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Berikut output nilai loading faktor dan AVE dari pengolahan data:

Tabel 1. Outer Loadings

	Transparansi	Akuntabilitas Keuangan	Pengelolaan Keuangan
X1.1	0.785		
X1.2	0.887		
X1.3	0.779		
X1.4	0.939		
X2.1		0.724	
X2.2		0.726	
X2.3		0.836	

X2.4	0.804
X2.5	0.760
Y1	0.899
Y2	0.909
Y3	0.763

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

Tabel 2. Average Variance Extracted

	Average Variance Extracted (AVE)
Transparansi	0.723
Akuntabilitas Keuangan	0.595
Pengelolaan Keuangan	0.739

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 1 *Outer Loadings* dan Tabel 2 *Average Variance Extracted (AVE)*, indikator X1.5 di buang dari perhitungan dikarenakan memiliki nilai loading factor dibawah 0.70 (<0.70), setelah indikator tersebut dibuang dan dilakukan perhitungan berikutnya, masing-masing indikator telah memiliki nilai *Loading Factor* lebih dari 0.70 (>0.70) serta memiliki nilai *Average Variance Extracted (AVE)* lebih dari 0.50 (>0.50), sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi rule of thumb dari validitas *convergent*.

Discriminant Validity

Validitas *discriminant* berhubungan dengan prinsip bahwa indikator-indikator konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi. Validitas *discriminant* dinilai berdasarkan nilai *cross loading*. Berikut output nilai *cross loading* dari pengolahan data:

Tabel 3. Cross Loadings

	Transparansi	Akuntabilitas Keuangan	Pengelolaan Keuangan
X1.1	0.785	0.498	0.341
X1.2	0.887	0.504	0.422
X1.3	0.779	0.513	0.319
X1.4	0.939	0.751	0.659
X2.1	0.533	0.724	0.413
X2.2	0.509	0.726	0.393
X2.3	0.485	0.836	0.588
X2.4	0.632	0.804	0.504
X2.5	0.522	0.760	0.700
Y1	0.443	0.659	0.899
Y2	0.569	0.696	0.909
Y3	0.384	0.397	0.763

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 3 Validitas *Discriminant*, masing-masing variabel

memiliki nilai *cross loading* lebih besar dari 0.70 (>0.7) serta indikator-indikator konstruk yang berbeda tidak berkorelasi tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi rule of thumb dari validitas *discriminant*.

Reliability

Uji realibilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrument dalam mengukur konstruk. Untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif dapat dilakukan dengan dua acara yaitu dengan *Cronbach Alpha* dan *Composite Reliability*. Berikut output nilai *Cronbach Alpha* dan *Composite Reliability* dari pengolahan data:

Tabel 4. Cronbach Alpha dan Composite Reliability

	Cronbach Alpha	Composite Reliability
Transparansi	0.873	0.912
Akuntabilitas Keuangan	0.894	0.880
Pengelolaan keuangan	0.826	0.894

Sumber: Data Diolah Peneliti

Berdasarkan Tabel 4 *Cronbach Alpha* dan *Composite Reliability*, masing-masing variabel memiliki nilai *cronbach alpha* dan nilai *composite reliability* lebih dari 0.70 (>0.70), sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi *rule of thumb* dari uji reliabilitas.

Inner Model (Model Struktural)

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R^2 berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan.

Tabel 5. Koefisien Determinasi

	R^2	Adjusted R^2
Pengelolaan Keuangan	0.502	0.480

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 5 Koefisien Determinasi (R^2), nilai R^2 sebesar 0.503

berarti Pengelolaan Keuangan dapat dijelaskan sebesar 50.2% oleh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan sedangkan sisanya sebesar 49.8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Nilai signifikansi dari path coefficient digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Nilai signifikansi yang digunakan *two tailed*, *T-statistics* > 1,96 untuk *significance level* = 5% atau 0.05.

Tabel 6. Path Coefficient

	<i>Original Sample</i>	<i>T-Statistics</i>	<i>P-Values</i>
Transparansi	0.125	0.891	0.373
Akuntabilitas Keuangan	0.616	0.153	0.000

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 6 *Path Coefficient*, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Transparansi tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan, dengan koefisien parameter sebesar 0.125 pada tingkat signifikansi 5% (*T-Statistics* < 1.96 dan *p values* > 0.05).
2. Akuntabilitas Keuangan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan, dengan koefisien parameter sebesar 0.616 pada tingkat signifikansi 5% (*T-Statistics* < 1.96 dan *p values* < 0.05).

Pembahasan

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes

Berdasarkan tabel *path coefficient* diatas menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa H1 ditolak karena memiliki koefisien parameter sebesar -0.014 pada tingkat signifikansi 5% (*T-Statistics* > 1.96 dan *P-Value* < 0.05). Hal ini berarti transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan BUMDes.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori keagenan dimana tidak berpengaruhnya transparansi terhadap pengelolaan keuangan BUMDes dapat disebabkan lemahnya kompetensi pelaksana operasional BUMDes. Tidak berpengaruhnya transparansi terhadap pengelolaan keuangan BUMDes dapat mengakibatkan asimetri informasi antara pihak terkait. Transparansi adalah wujud dari pertanggungjawaban pengelola BUMDes atas pengelola sumberdaya ekonomi digunakan oleh pengelola BUMDes selama satu periode dan sebagai ikhtiar meningkatkan manajemen keuangan untuk mengurangi kecurangan dalam pengelolaan keuangan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil Hamid dan Maulinda (2019), yurie et al. (2021), Fadil et al. (2022) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Tetapi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Maryono (2022), Ariski dan Asy,ari (2022), Sukmawati dan Nurfitriani (2019) yang menyebutkan bahwa tidak adanya pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan.

Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes

Berdasarkan tabel *path coefficient* menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa H1 ditolak karena memiliki koefisien parameter sebesar 0.370 pada tingkat signifikansi 5% (*T-Statistics* > 1.96 dan *P-Value* < 0.05). Hal ini berarti akuntabilitas keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan BUMDes.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keagenan dimana adanya akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan BUMDes

menggambarkan bahwa pengelola BUMDes telah menerapkan peraturan yang telah ditetapkan serta program kegiatan yang dijalankan mampu dipertanggungjawabkan kepada pihak pemerintah desa.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosmaida dan Handayani (2022), Fadil et al. (2022), Sukmawati dan Nurfitriani (2019), Putri dan Maryono (2022) yang menyebutkan bahwa adanya pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap pengelolaan keuangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Transparansi Tidak Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes.
2. Akuntabilitas Keuangan Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk pengelola BUMDes agar lebih meningkatkan Transparansi pada pengelolaan keuangan agar dapat meminimalisir terjadinya tindak kecurangan, mengoptimalkan kinerja keuangan BUMDes dan pengelolaan keuangan BUMDes.
2. Untuk penasihat BUMDes atau pihak kepala desa harus lebih aktif dalam berpartisipasi mengawasi dan memberikan usulan terhadap pengelolaan keuangan BUMDes untuk meningkatkan transparansi agar terhindar dari tindak kecurangan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah di usahakan dan dilakukan berdasarkan prosedur

ilmiah, namun demikian masih terdapat keterbatasan yaitu:

1. Adanya keterbatasan menggunakan kuesioner yaitu terkadang jawaban yang diberikan tidak sesuai yang terjadi dilapangan.
2. Keterbatasan jumlah pengelola BUMDes yang paham akan mekanisme dan pentingnya pengelolaan keuangan BUMDes.

Implikasi Penelitian

Tidak berpengaruhnya transparansi pengelolaan keuangan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kurang transparannya pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Pacet. Pelaksana operasional BUMDes harus meningkatkan transparansi tersebut melalui peningkatan transparansi pada laporan keuangan BUMDes agar tidak terjadinya konflik dan asimetri informasi kepada pihak pemerintah desa. Karena dengan adanya transparansi pada pengelolaan keuangan BUMDes dapat memberikan manfaat atau kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat desa melalui PADes.

Berpengaruhnya akuntabilitas keuangan menunjukkan bahwa pentingnya akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan BUMDes. Akuntabilitas keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan. Pihak operasional BUMDes harus tetap menjaga prinsip-prinsip tersebut agar terciptanya Good Corporate Governance dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Pacet.

DAFTAR PUSTAKA

Aliah, N., Rizkina, M., & Fadilah, N. (2021). Laporan Keuangan Dan Efektivitas Pengelolaan BUMDES.

- Dalam *Seminar of Social Sciences Engineering*. Medan.
- Apriliansari, R., Nurhayati, N., & Purnama, D. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Kuningan. Dalam *Jurnal Tirtayasa EKONOMIKA* (Vol. 16, Nomor 2).
- Apriliasari, K., & Mawardi C. M. (2022). Transparansi Pengelolaan Pada Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Laporan Aset Desa (Studi Kasus BUMDES Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari), Dalam *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* (Vol. 11).
- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten). Dalam *Jurnal Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.18196/rab.040152>
- Ayu, A. N., & Asim, A. M. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Jaya Tirta”. Dalam *Jurnal Riset Akuntansi JUARA* (230).
- Bare, Y. A., Mangindaan, J. v, Program, A. Y. P., & Bisnis, S. A. (2021). Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes di Desa Bawo Kecamatan Tagulandang Utara. Dalam *Productivity* (Vol. 2, Nomor 3).
- Dewi, K. C., Kurniawan, P. S., Putra, N., Jurusan, Y., & Program, A. (2018). Badan Usaha Milik Desa (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Mandala Giri Amertha Desa Tajun). Dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol. 9, Nomor 3).
- Rofidah, N., & Rochyatun, S. (2020). Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Desa Gondowangi Wagir Kabupaten Malang). Dalam *Jurnal Akuntansi* (Vol. 11, Nomor 1).
- Hamid, M. A., & Maulindra, B. S. A. M. (2019). Penerapan Good Corporate Governance Dalam Tata Kelola BUMDes Sumber Jaya. Dalam *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah* (Vol. 2, Nomor 2).
- Hasibuan, S., & Nurhayati. (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Di Desa Sialang Rindang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Akuntansi* (Vol. 8, Nomor 2).
- JDIH BPK RI. (2022). Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/199693/permendesa-pdtt-no-7-tahun-2021>
- JDIH BPK RI. (2021). Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/199691/permendesa-pdtt-no-5-tahun-2021>
- Mariana, L. (2021). Analisis Sistem Akuntansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). *Jurnal Akmen* (Vol. 18, Nomor 1). <https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen>
- Murtiningsih, S., Probowulan, D., & Sita, A. (2021). Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Rejo Makmur Pada

- Pelaporan Pendapatan Desa Kebonrejo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (Vol. 42, Nomor 1).
- Nyoman, N., & Indriyanthi, I. (2021). Analisis Pengelolaan Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Dalam *Jurnal Risma* (Vol. 1, Nomor 4).
- Patria, N., Sapitri, G., Ekonomi, F., Islam, B., & Kerinci, I. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Pulau Sangkar. Dalam *Jurnal Ekopendia* (Vol. 7, Nomor 1).
- Perda. (2019). Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Diakses dari <https://peraturanpedia.id/peraturan-daerah-kabupaten-mojokerto-nomor-9-tahun-2019/>
- Purba, S., Nainggolan, A., & Telaumbanua, A. G. (2021). Analysis Of Financial Management Accountability BUMDes Famohouni In Village Madula Kecamatan Gunungsitoli Gunungsitoli City North Sumatra. Dalam *Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis* (Vol. 188, Nomor 2). <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/KURS/index>
- Purwanti, H., & Yuliati, A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kabupaten Kediri. Dalam *Jurnal Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi* (Vol. 6, Nomor 3).
- Puspitasari, M., Ardiyansyah, C., & Hapsari, A. N. S. (2022). Mampukah Gaya Kepemimpinan Mendorong Pengelolaan Keuangan BUMDes yang Akuntabel dan Transparan? Dalam *Jurnal Perspektif Akuntansi*, 5(3), 273–295. <https://doi.org/10.24246/persi.v5i3.p273-295>
- Putri, A. R. L., & Maryono. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 4, Nomor 3)
- Rofidah, N., & Rochayatun, S. (2020). Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Desa Gondowangi Wagir Kabupaten Malang). Dalam *Jurnal Akuntansi* (Vol. 11, Nomor 1).
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). Dalam *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM* (Vol. 2, Nomor 1).
- Trimurti, A., Ana, R., & Ga, L. L. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDes (Studi Kasus BUMDes Ina Huk). Dalam *Jurnal Akuntansi* (Vol. 2021, Nomor 1).
- Wibowo, S. M. I., & Hapsari S. A. N. (2022). Pengelolaan Keuangan BUMDes: Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(01), 52–71. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.05>

- Widodo, T., & Suharyono, D. (2021). Pengaruh Perencanaan Serta Pelaksanaan dan Penatausahaan Terhadap Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes. Dalam *Jurnal Ekonomi* (Vol. 17, Nomor 1).
- Wijaya, et., al. (2022). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Transparansi Kinerja Keuangan BUMDes. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. 4(03), 1229-1242.
- Yustien, R. (2022). The Effect Of Accountability And Transparency In Soe Financial Management On The Welfare Of The Community Of Dharmasraya. Dalam *Jurnal Jambi Accounting Review (JAR) JAR* (Vol. 3, Nomor 1). <https://onlinejournal.unja.ac.id/JAR/>